

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah dalam Agunggunanto, 2016). Selanjutnya, melihat pentingnya pembangunan desa bagi pembangunan yang berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa lahir karena pemerintah perlu menyelenggarakan otonomi desa dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada desa secara proporsional, serta diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya desa serta perimbangan keuangan pusat dan desa.

Selain sebagai upaya perbaikan pengelolaan pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan terwujudnya desa mandiri melalui pengembangan ekonomi dan potensi lokal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) juga telah menetapkan 4 program prioritas percepatan pembangunan desa, yaitu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung desa, pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), dan membangun sarana olahraga (Raga Desa). Keempat program tersebut dapat dikembangkan salah satunya melalui desa wisata.

Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan. Selain itu, keberadaan desa wisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengembangan desa wisata memiliki dampak meningkatkan kondisi daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan sosial budaya masyarakat, pengembangan desa wisata juga berdampak pada perekonomian dan jasa pariwisata sekitar Rp 2.501.000 - Rp 3.500.000 per bulan. (Syaiful dan Fafurida, 2019).

Pada Tahun 2020, di Jawa Tengah sendiri terdapat destinasi wisata sebanyak 1.024 yang terdiri dari 341 Wisata Alam, 158 Wisata Budaya, 295 Wisata Buatan, 66 Wisata Minat Khusus dan 96 wisata lainnya (event) (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2020). Untuk tahun 2022, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah menganggarkan bantuan desa wisata sebesar Rp. 18,5 Miliar. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 131 desa wisata yang tersebar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang meliputi kategori desa wisata maju, desa wisata berkembang, dan desa wisata rintisan. Adanya dana bantuan yang diperuntukkan untuk desa wisata ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata yang dimiliki masing-masing desa berupa produk pariwisata.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan desa wisata. Berdasarkan perda tersebut, pemberdayaan potensi desa wisata di Jawa Tengah dibagi kedalam tiga bagian yaitu wisata alam, yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam pedesaan; wisata budaya, yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan local seperti upacara adat, music tradisional, kesenian tradisional, cagar budaya, wisata religi, kerajinan lokar, tari tradisional, dan kuliner; serta wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreativitas individu dalam suatu tempat seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni lukis, seni rupa, taman rekreasi, dan sanggar budaya.

Berdasarkan data BPS, jumlah desa wisata pada tahun 2017 hingga 2020 di Jawa Tengah jumlahnya terus mengalami kenaikan. Berikut tabel jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2020 :

Tabel 1. 1 Jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2020

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	182
2.	2018	339
3.	2019	353
4.	2020	551

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2020

Pada tahun 2020, wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) menyumbang 26,07% sebagai sentra pariwisata di Jawa Tengah (BPS,2020). Peningkatan pariwisata di Jawa

Tengah ini tentu diikuti dengan perkembangan desa wisata di kabupaten/kota. Perkembangan Desa Wisata di Kabupaten Kendal semakin maju didukung dengan visi misi Bupati Kendal saat ini yakni untuk mewujudkan Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan serta berfokus pada empat pilar pembangunan, yaitu Industri, Pariwisata, UMKM, dan Generasi 4.0. Untuk mewujudkan visi misi tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh *stakeholders* melalui interaksi dalam pengelolaan pariwisata. Penelitian terdahulu menunjukkan terdapat beberapa permasalahan terkait keterlibatan antar pihak dalam pengembangan wisata budaya yaitu kurangnya komunikasi antara pihak dan kurangnya tanggungjawab dalam mengelola maupun mempromosikan kampung budaya (Redyanto, dkk, 2018). Peran pemerintah juga diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Pelaksanaan koordinasi antar *stakeholders* dalam pengembangan wisata tidaklah mudah, terutama dalam mempertahankan komunikasi dan kesiapan masing-masing *stakeholders*.

Desa Jungsemi merupakan salah satu desa wisata yang berada di daerah pesisir Kabupaten Kendal yang pengembangannya sedang digiatkan oleh pemerintah. Wisata yang berkembang di Desa Jungsemi antara lain wisata alam meliputi Wisata Pantai Indah Kemangi, wisata budaya kesenian barongan, wisata edukasi budidaya ikan nila dan ternak kambing etawa, wisata kuliner khas daerah pesisir, serta wisata religi. Awal mula Desa Wisata Jungsemi adalah sejak dibukanya Pantai Indah Kemangi di tahun 2018 oleh

akademisi dari UPGRIS dan diresmikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

Kemudian sejak bergantinya Bupati Kendal yang tentunya diikuti dengan perubahan visi misi Kabupaten Kendal menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan. Maka pemerintah semakin giat menjalin kolaborasi baik antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dan pihak swasta, maupun swasta dengan pemerintah. Kolaborasi tersebut tentunya bertujuan untuk menarik minat wisatawan terhadap Desa Wisata Jungsemi. Berikut jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Jungsemi :

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Desa Wisata Jungsemi Tahun 2020-2021

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Pengunjung
1.	2020	Juli	5.336 Pengunjung
		Agustus	7.182 Pengunjung
		September	5.846 Pengunjung
		Oktober	7.289 Pengunjung
		November	7.430 Pengunjung
		Desember	4.765 Pengunjung
2.	2021	Januari	11.353 Pengunjung
		Februari	3.717 Pengunjung
		Maret	8.103 Pengunjung
		April	6.529 Pengunjung
		Mei	17.991 Pengunjung
		Juni	10.122 Pengunjung
		Juli	-
		Agustus	5.656 Pengunjung
		September	18.428 Pengunjung
		Oktober	26.581 Pengunjung

		November	17.774 Pengunjung
		Desember	19.659 Pengunjung

Sumber : Laporan Tahunan Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2020-2021.
Dokumen tidak dipublish

Jumlah pengunjung yang fluktuatif disebabkan karena adanya pandemi dan pembatasan kegiatan terutama di tempat wisata. Selain itu, jumlah pengunjung di tahun sebelumnya tidak terdata dikarenakan pengelolaan oleh POKDARWIS dan BUMDES yang kurang terkoordinir. Namun, secara keseluruhan jumlah pengunjung setiap tahunnya terus meningkat. Sebagai pengelola wisata saat itu, Pemerintah Desa Jungsemi memberikan kontribusi berupa subsidi dana pendidikan kepada anak-anak asli Desa Jungsemi. Dana subsidi tersebut merupakan hasil dari penjualan tiket masuk wisata Pantai Kemangi. Kedepannya pemerintah desa juga berencana untuk mengembangkan *sport tourism* dan merilis program kuliah gratis. Adapun strategi pemerintah desa dalam pengelolaan Desa Wisata Jungsemi antara lain :

1. Pengembangan kerja sama melalui kemitraan strategis dengan instansi-instansi penyumbang modal
2. Memperkuat kinerja perangkat desa
3. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan desa wisata
4. Menjalin komunikasi yang erat dengan masyarakat.

Pada pertengahan februari 2021, Desa Jungsemi bersama tujuh desa lain di Kendal meraih Anugrah Desa Wisata 2021 oleh Kementrian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuh desa yang menerima penghargaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Desa yang mendapat penghargaan Anugrah Desa Wisata 2021 oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kendal.

No	Desa	Kecamatan
1.	Desa Wisata Gondang	Kecamatan Limbangan
2.	Desa Wisata Bendosari	Kecamatan Plantungan
3.	Desa Wisata Kedungboto	Kecamatan Limbangan
4.	Desa Wisata Mororejo	Kecamatan Kaliwungu
5.	Desa Wisata Jungsemi	Kecamatan Kangkung
6.	Desa Wisata Blimbing	Kecamatan Boja
7.	Desa Wisata Sidomakmur	Kecamatan Kaliwungu Selatan

Sumber : www.jateng.news.com (diolah oleh Peneliti tahun 2022)

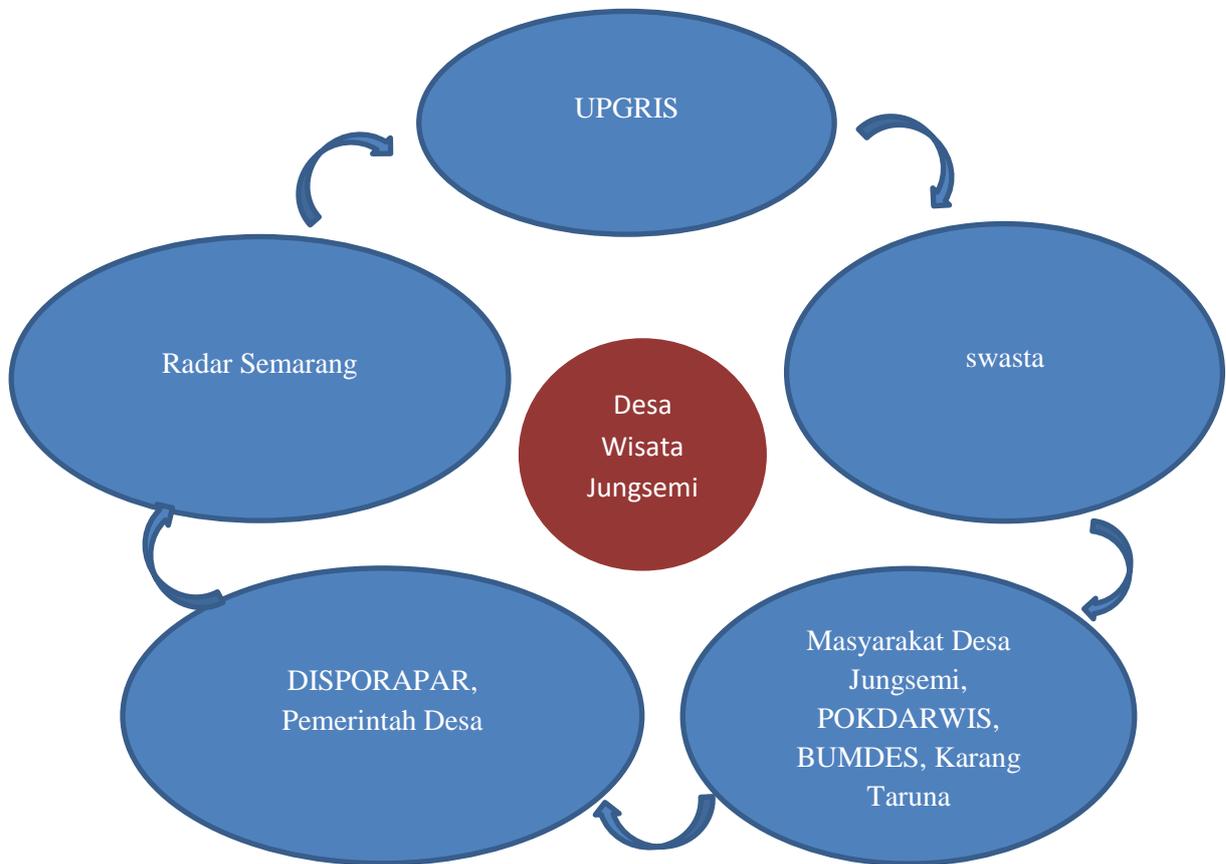
Anugerah ini merupakan bentuk nyata yang membuktikan bahwa Desa Jungsemi mampu berkembang dalam mengelola potensi desa. Serta sebagai wujud untuk mendukung visi pemerintah melalui pengembangan pariwisata. Dengan pemberian penghargaan Desa Wisata, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi desa lainnya untuk serta mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia. Bentuk keberhasilan Desa Wisata Jungsemi tersebut didukung oleh peran beberapa *stakeholders*.

Akademisi yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi yaitu UPGRIS. UPGRIS memberikan kontribusinya dalam mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki Desa Jungsemi. Selain itu memberikan pelatihan dalam bidang pariwisata melalui pengarahan terkait pengelolaan desa wisata dan pelatihan pengolahan semangka menjadi

minuman isotonic. Kemendikti melalui UPGRIS juga memberikan bantuan dana selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019 untuk pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Pemerintah yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi meliputi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal yang berperan sebagai koordinator yang mengatur dan mengkonsepsikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Jungsemi serta mempromosikan pariwisata. Kementrian Desa melalui banprov dan BUMDES memberikan bantuan untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana di sekitar Desa Wisata Jungsemi. BUMDES Sidodadi Desa Jungsemi dalam meningkatkan daya tarik wisata kemudian membangun tiga buah gazebo di wilayah pantai.

Masyarakat Desa Jungsemi sebagai pelaksana pengembangan Desa Wisata berperan dalam menyediakan lahan, tenaga kerja, juga akomodasi pengembangan wisata. POKDARWIS dan karang taruna sebagai komunitas yang berperan dalam perkembangan pariwisata juga sangat diharapkan kontribusinya. Pemerintah Desa Jungsemi dalam hal ini menjadi koordinator segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Media website resmi Desa Jungsemi, dan Radar Semarang dalam pengembangan desa wisata berperan sebagai pendukung promosi dan penyebaran informasi.

Gambar 1. 1 Stakeholder yang Terlibat dalam Pengembangan Desa Wisata Jungsemi



Sumber : diolah oleh Peneliti tahun 2022

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa UPGRIS sebagai akademisi menjadi perintis dari terbentuknya Desa Wisata Jungsemi. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana prasarana wisata. Namun, kerjasama tersebut tidak berlanjut dikarenakan pihak pemerintah desa tidak sepenuhnya mendukung adanya kerjasama dan hingga saat ini belum ada lagi pihak swasta yang menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Jungsemi. Keberadaan masyarakat yang antusias dan peduli terhadap potensi yang dimiliki desa menjadikan Desa

Wisata Jungsemi terus berkembang. Salah satunya dengan mendirikan usaha dan UMKM di sekitar pantai melalui komunitas pedagang yang hanya beranggotakan masyarakat Desa Jungsemi. Partisipasi masyarakat local yang tinggi menjadikan pemerintah tertarik untuk memberikan bantuan termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana maupun dana untuk pengembangan Desa Wisata.

Sejak awal berdirinya wisata Pantai Indah Kemangi sebagai salah satu objek wisata di Desa Wisata Jungsemi tidak berjalan secara lancar. POKDARWIS dan karang taruna yang berperan untuk mengelola wisata dinilai tidak maksimal dalam pengelolaannya. Pemerintah desa seperti perangkat desa juga masih ikut terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata pantai yang mengakibatkan adanya tumpang tindih pekerjaan. Sementara itu, wisata edukasi ikan nila yang diberikan oleh BAZNAS tidak berlanjut dikarenakan tidak adanya pengurus dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pemeliharaan ikan nila.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi, media yang ada seperti website desa jungsemi dan website jadesta belum memuat informasi secara lengkap terkait dengan Perkembangan Desa Wisata. Peran pemerintah desa dalam membantu promosi juga masih sangat kurang. Jika pengunjung membuka web Desa Wisata Jungsemi hanya akan ada foto Desa Wisata Jungsemi serta keragaman yang dimilikinya tanpa adanya keterangan lain yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Belum ada media sosial yang secara aktif memberikan informasi mengenai Desa Wisata

Jungsemi. Media sebagai promotor Desa Wisata Jungsemi dalam hal ini masih memerlukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya untuk dapat terus memperbarui perkembangan Desa Wisata Jungsemi.

Keberhasilan pembangunan Desa Wisata Jungsemi tidak hanya berasal dari satu pihak. Peran *stakeholders* sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Adanya permasalahan terkait dengan koordinasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata Jungsemi seharusnya menjadi evaluasi untuk stakeholder yang terlibat agar semakin meningkatkan kontribusi dalam membangun Desa Wisata. Peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi antar *stakeholders* diperlukan untuk mempermudah kinerja pemerintah daerah maupun desa dalam pengelolaan Desa Wisata Jungsemi.

Masing-masing *stakeholders* tidak dapat berdiri sendiri, namun harus menjalin kolaborasi untuk mewujudkan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akademisi berperan sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan sosial. Swasta sebagai sumber daya modal berperan dalam pengembangan pembangunan pariwisata. Masyarakat sebagai pemilik sumber daya baik tradisi, adat, dan budaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan wisata. Pemerintah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memiliki kewenangan sebagai pembuatan regulasi dalam pembangunan kepariwisataan, dan berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan dengan

mengintegrasikan program-program di daerah dengan program pusat. Media berperan sebagai promotor objek wisata yang mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan program dan informasi terbaru dalam pengembangan desa wisata. Keterlibatan segenap elemen dalam proses pembangunan pariwisata diharapkan mampu membawa dampak yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan, melainkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, diasumsikan bahwa koordinasi seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pengembangan desa wisata.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Relasi yang kurang harmonis antara POKDARWIS, Swasta, dan pemerintah desa.
2. Masih terdapat ego sektoral antar *stakeholders*.
3. Rendahnya konsistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi antar *stakeholders* Desa Wisata Jungesmi dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat koordinasi dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Jungesmi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dari topic penelitian yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis koordinasi antar *stakeholders* pengembangan Desa Wisata Jungesmi.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat koordinasi dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Jungesmi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan penelitian koordinasi dalam kolaborasi antar *stakeholders* pembangunan desa wisata di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Menjadi kontribusi untuk memecahkan masalah dalam lingkup koordinasi antar *stakeholders* dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata, serta faktor pendukung dan penghambat koordinasi antar *stakeholders* dalam kolaborasi pengembangan desa wisata.
2. Memberikan masukan dan dorongan kepada seluruh *stakeholders* untuk lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam partisipasi pembangunan yang ada di sekitarnya.
3. Memberikan pemahaman kepada seluruh *stakeholders* agar memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pengembangan desa wisata.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fanni Fatmawati, dan Budi Kurnia (2017)	Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar di Kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang (Studi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.	Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar sudah disertai dengan adanya kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan kedisiplinan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan objek wisata.

		Sumedang)		
2.	Maya Shafa Nuwita, Rahayu Sulistiowati, dan Meliyana (2021)	Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi.	Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder tidak selalu melalui forum resmi atau rapat, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih dalam tatanan koridor yang jelas. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar stakeholder seperti timbulnya pemikiran ego dari masing-masing pihak individu yang menomorsatukan kepentingan pribadi.
3.	Noviana Wahyu Prabandary (2017)	Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Koordinasi antar pengelola benda cagar budaya Candi Borobudur melalui pedoman kerja, forum dan konferensi namun proses koordinasi antar institusi masih belum efektif dan optimal karena belum diterapkannya insentif koordinasi dan kalender pertemuan rutin
4.	Riska Destiana, Kismartini, dan Tri Yuniningsih (2020)	Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif . Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder	Pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat melibatkan stakeholders dengan konsep pentahelix, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Hubungan antar stakeholders dilihat dari bentuk dan aktivitasnya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, serta kepercayaan dan kebijakan menjadi faktor penghambatnya.
5.	Fitri Handayani, dan Hardi Warsono (2017)	Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat sekitar, dan pengusaha. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan meliputi pembuat kebijakan, koordinator,

		Kabupaten Rembang	dokumentasi.	fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata lebih ditekankan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik.
6.	Deden Saputra (2020)	Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat	Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, dengan menekankan instrumen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur	Kerjasama yang terjadi belum sepenuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak berjalan secara bersinergi. kerjasama yang terjadi belum sepenuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak berjalan secara bersinergi.
7.	Ardhia Mafaza, dan Kristina Setyowati (2020)	Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	<i>Collaborative governance</i> diantara para <i>stakeholders</i> dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan para stakeholder sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator kolaborasi dari De seve.
8.	Hardjosoekarto S., Robert M.Z. Lawang (2021)	The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.	Pemerintah telah mampu mengembangkan fungsi dalam pembangunan pariwisata yaitu koordinasi, perencanaan, regulasi dan legislasi, kewirausahaan, stimulus dan promosi, peran wisata sosial dan peran perlindungan kepentingan.
9.	Fandri Wahyu Redyanto, Dkk. (2018)	Model Kerjasama Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data berupa tulisan atau kata-kata lisan dari	<i>Collaborative governance</i> dalam Pengembangan wisata budaya Dusun Sejo melibatkan hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Namun, model kerjasama antar stakeholder tersebut belum maksimal, dan pembangunan wisata budaya tersebut tidak berkelanjutan

		Kabupaten Pasuruan	narasumber di lapangan.	sehingga tidak terdapat peningkatan dalam proses pengembangan wisata.
10.	Emmanuel Akwasi Adu-Ampong (2017)	Divided we stand: institutional collaboration in tourism planning and development in the Central Region of Ghana	Penelitian ini menggunakan wawancara ekstensif dan meninjau dokumen kebijakan yang digunakan dalam kolaborasi.	Kolaborasi dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata di Ghana masih berada di tahap pembentukan jaringan. Namun, para pemangku kepentingan terus mengupayakan koordinasi secara formal dan informal.
11.	Muchamad Zaenuri, Yusrim Musa, Muhammad Iqbal (2021)	Collaboration Governance in The Development of Natural Based Tourism Destinations	Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif.	Kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata sudah terdapat dialog yang intensif diantara stakeholder, saling percaya diantara pemangku kepentingan, komitmen yang sudah tinggi, dan terdapat berbagi pemahaman yang cukup merata. Namun dari keempat hal tersebut belum tercipta hubungan yang bersifat formal, sehingga perlu ada proses transformasi menuju kemitraan dan berkelanjutan dalam suatu ikatan yang bersifat formal.
12.	Anya Risnawati Soerya Putri, dan Nunung Munawaroh (2018)	Koordinasi Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Strategi Pengembangan Destination Management Organization (DMO) Di Pangandaran (Studi pada Disparperindagk op UMKM dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran	Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Mekanisme koordinasi antar stakeholder dalam meningkatkan pengembangan DMO dilakukan dua fase. Fase pertama berfokus pada perencanaan masterplan dan koordinasi bottom-up dari pemerintah. Fase kedua mengacu pada perkembangan pariwisata berkelanjutan.

		Provinsi Jawa Barat)		
13.	Xiubai Li , Jinok Susanna Kim, dan Timothy J. Lee (2021)	Collaboration for Community-Based Cultural Sustainability in Island Tourism Development: A Case in Korea	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur.	Kekuasaan informal yang dipegang masyarakat Jeju berindikasi negatif terhadap keberlanjutan pariwisata. Selain itu, ada hubungan kuat antara kolaborasi dengan keberlanjutan budaya.
14.	Mia Fairuza (2017)	Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.	Kolaborasi antar <i>stakeholders</i> di Pulau Merah hampir tidak berjalan mulus. Meskipun demikian ada beberapa komponen kolaborasi yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan pariwisata di Pulau Merah. Komponen-komponen tersebut adalah pemahaman bersama, administrasi yang baik, dan mutualitas.

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan berbagai penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berasal dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, umumnya membahas mengenai koordinasi dan kolaborasi stakeholders dengan teorinya masing-masing. Peneliti akan mendeskripsikan secara singkat penelitian terdahulu berdasarkan kesamaan teori yang digunakan sebagai berikut:

Teori koordinasi menurut Ndraha (2015) meliputi informasi, komunikasi, dan teknologi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi stakeholders, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, dan feedback adalah teori yang digunakan pada penelitian: 1) Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar di Kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang) oleh Fanni Fatmawati, dan Budi Kurnia (2017); 2) Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran oleh Maya Shafa Nuwita, dkk (2021); 3) Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur oleh Noviana Wahyu Prabandary (2017). Selain menggunakan teori peran stakeholders menurut Ndraha, terdapat persamaan pada tiga penelitian tersebut, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik penelitian purposive dan snowball sampling.

Teori identifikasi stakeholders menurut Maryono (2005) meliputi stakeholders primer, kunci, dan sekunder adalah teori yang digunakan pada penelitian: 1) Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau oleh Rizka Destiana, dkk (2020); 2) Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe oleh Fitri Handayani, dkk (2021); 3) Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis

Masyarakat oleh Deden Saputra (2020). Ketiga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan secara singkat hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menunjang pendalaman topik penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mafaza dan Setyowati (2020) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata membahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengembangkan desa wisata tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapi melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik dari BUMN, Pemerintah, BUMDES, dan masyarakat sendiri. Selain itu juga terjadi pertukaran informasi dilakukan melalui komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan melalui pertemuan rutin atau sesekali. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen stakeholders dalam kolaborasi dibuktikan dengan adanya upaya saling bahu membahu antar stakeholders untuk mencapai tujuan.

Fatmawati dan Kurnia (2017) melakukan penelitian dengan judul Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar di Kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui koordinasi dalam pengembangan objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi yang dilakukan pengelola dalam Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar sudah disertai dengan adanya kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan kedisiplinan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan objek wisata.

Komunikasi yang dilakukan antar stakeholders melalui penyampaian surat undangan dan diskusi secara langsung dapat mendorong partisipasi dari berbagai pihak untuk turut serta dalam pengembangan objek wisata. Komunikasi tersebut dilaksanakan melalui forum pertemuan rutin setiap satu bulan sekali, dan komunikasi informal yang seringkali dilakukan melalui whatsapp.

Penelitian yang dilakukan Destiana, dkk (2020) yang berjudul Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan stakeholders dengan konsep pentahelix, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Hubungan antar stakeholders dilihat dari bentuk dan aktivitasnya. Dalam indikator nilai profesionalitas telah menunjukkan bahwa terdapat kemampuan stakeholders dalam menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsinya Hal ini didukung dengan keberadaan pokdarwis yang telah memiliki kesadaran dalam mendorong pertumbuhan pariwisata melalui konsep sapta pesona pada destinasi wisata halal Pulau Penyengat. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardjosoekarto, dkk (2021) yang berjudul The Role of Local Government on Rural Touris Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia, dalam mengembangkan sektor pariwisata pemerintah desa memberikan kewenangan kepada pokdarwis,

namun karena terjadi kegagalan dalam kesepakatan kerjasama pengelolaan tersebut dikembalikan pada pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan Redyanto (2018) dengan judul Model Kerjasama Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya keberhasilan pengembangan wisata terletak pada kolaborasi sumber daya pelaksana yang sesuai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Collaborative governance dalam Pengembangan wisata budaya Dusun Sejo melibatkan hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Namun, model kerjasama antar stakeholder tersebut belum maksimal, dan pembangunan wisata budaya tersebut tidak berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan dalam proses pengembangan wisata.

Adu-Ampong (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Divided we stand: institutional collaboration in tourism planning and development in the Central Region of Ghana* menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan pariwisata terus mengusahakan agar pariwisata menjadi pembangunan yang positif maka pemangku kepentingan harus saling berbagi informasi dan keputusan terkait dengan proses perencanaan pariwisata. Hal ini diupayakan melalui koordinasi secara formal dan informal. Dilihat dalam pengelolaan pariwisata telah memiliki komitmen yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian Zaenuri, dkk (2021) dengan judul *Collaboration Governance in The Development of Natural Based Tourism Destinations* juga menunjukkan

bahwa Kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata sudah terdapat dialog yang intensif diantara stakeholder, saling percaya diantara pemangku kepentingan, komitmen yang sudah tinggi, dan terdapat berbagi pemahaman yang cukup merata.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2018) dengan judul Koordinasi Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Strategi Pengembangan Destination Management Organization (DMO) Di Pangandaran menunjukkan bahwa dalam implementasi Destination Management Organization (DMO) belum semua kepentingan memiliki komitmen dan keinginan yang sama, sehingga optimalisasi dan sinergi pemangku kepentingan harus terus dibangun. Penelitian yang dilakukan oleh Fairuza (2017) dengan judul Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi) juga menyebutkan bahwa komitmen antar stakeholders tidak baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuwita, dkk (2021) yang berjudul Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran bahwa kesatuan tindakan pada seluruh stakeholders pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka, ditandai dengan adanya kesatuan pikiran untuk mengembangkan objek wisata secara bersamaan. Dalam penelitian ini, koordinasi pengembangan wisata Desa Sungai Langka terdapat sanksi koordinasi berupa hukuman dikeluarkan dari susunan para stakeholder dan

memberikan ganti rugi atas perbuatan ingkar yang dilakukan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Handayani, dkk (2017) dan Prabandary (2017) yang berkaitan dengan koordinasi dalam pengelolaan pariwisata belum di dukung dengan adanya sanksi yang mengikat.

Beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa analisis stakeholders dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan didominasi teknik purposive sampling dan snowball sampling. Perbedaan dari masing-masing penelitian ada pada teori yang digunakan untuk mengidentifikasi koordinasi yang terjadi antar stakeholders. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan keterlibatan dan koordinasi antar stakeholder. Stakeholder berperan penting dalam pengembangan pariwisata terutama sebagai pelaku yang mengetahui jalannya kesuksesan proses koordinasi. Oleh Karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang terjadi antar stakeholder dalam proses kolaborasi pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Penelitian ini merupakan ide orisinil penulis, dan belum ada topic, locus serta aspek penelitian yang sama.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Chander dan Plano dalam Keban (2004) mengemukakan administrasi publik merupakan proses sumber daya dan personel publik saling berkoordinasi untuk menformulasikan, mengimplementasikan, dan

mengelola keputusan dalam publik. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Kegiatan administrasi public berkaitan dengan pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public services*) masyarakat, atau yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat melalui program-program pembangunan. Sehingga dalam hal ini, administrasi publik berperan dalam menciptakan demokrasi melalui pemberdayaan masyarakat (Keban, 2004).

Waldo dalam Pasolong (2008) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik merupakan penggabungan antara teori dan praktik dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemerintah dalam dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi public merupakan proses manajemen yang dilakukan sesuai dengan kebijakan public untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka a mencapai kepentingan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik memiliki peran untuk menjalankan salah satu tugasnya yaitu pelayanan publik. Administrasi publik dari awal perkembangannya hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma. Nicholas Henry

(dalam Alamsyah, 2016), mengidentifikasi enam paradigma dalam administrasi publik, sebagai berikut (Alamsyah, 2016):

1. Dikotomi politik-administrasi (1900-1925)

Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926). Dalam bukunya *Politics and Administration*, Goodnow menegaskan bahwa ada dua fungsi negara beserta organ-organnya, yaitu politik dan administrasi. Fungsi politik memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat. Sedangkan fungsi administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan/ implementasi dari kebijakan/kehendak tersebut. Sehingga dalam paradigma yang pertama hanya ditekankan pada lokusnya saja yaitu birokrasi pemerintah. Fokus dalam paradigma ini kurang jelas atau tidak dipersoalkan apa fokusnya.

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi publik, karya Willoughby berjudul *Principles of Public Administration*, pada 1927. Buku ini menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah tertentu mengenai administrasi, bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan, dan bahwa para administrator akan menjadi ahli dalam pekerjaannya jika mereka mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pada paradigma kedua ini penelitian administrasi publik

berkembang sangat dramatis, universitas dan akademi membuka program administrasi publik. Periode ini merupakan titik puncak administrasi publik. Teoritisi administrasi publik mendapat pengakuan bukan hanya dalam pemerintahan tetapi juga dalam industri selama periode 1930 sampai awal 1940. Paradigma kedua berkenaan dengan “fokus” administrasi publik, yakni keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus administrasi publik tidak menjadi persoalan karena dianggap bahwa prinsip administrasi berlaku di semua setting administrasi, yakni organisasi publik maupun privat, tanpa ada batasan kultural. Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick & Urwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Tujuh prinsip dikenal dengan akronim POSDCoRB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Menurut Gulick & Urwick, prinsip-prinsip inilah yang menyebabkan organisasi bisa berjalan dengan baik, bukan dikotomi politik-administrasi.

3. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950 - 1970).

Pada paradigma ketiga administrasi publik kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus yakni di birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau

kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Dimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan persoalan negara dipengaruhi ilmu politik.

4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970).

Paradigma keempat terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga. Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisa sistem, riset operasi dan sebagainya merupakan fokus dalam paradigma ini. Arah perkembangan yang terjadi dalam paradigma ini, antara lain :

1. Berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi yang didukung oleh disiplin psikologi sosial
2. Berorientasi kepada kebijakan publik, semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi dalam dunia administrasi publik. Karena hal tersebut sebagai suatu paradigma, manajemen menyediakan suatu fokus, bukan lokus.

5. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 -)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Sejak 1970, administrasi publik diakui sebagai suatu bidang ilmu.

Lokusnya adalah pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik dan political-economy.

6. *Public administration and public affair*

Paradigma ini merupakan paradigma terakhir dan berhubungan dengan pemerintahan. Paradigma ini dimulai 1990an. Selama paradigma ini terjadi perubahan persepsi pemerintah dan administrasi yang terjadi. Perubahan tersebut dicatat dalam tiga klasifikasi, yaitu globalisasi, redefinisi dan devolusi.

1. Globalisasi, melibatkan penggabungan perusahaan-perusahaan multinasional, internet, isu-isu lingkungan di seluruh dunia dan perdagangan internasional.
2. Redefinisi, melibatkan proses yang sebenarnya oleh pemerintah untuk mendefinisikan kembali posisi pemerintah. Pemerintah bergerak dari kekuasaan dan hirarki menuju kolaborasi dan kemitraan
3. Devolusi, termasuk partisipasi warga negara, kelompok warga, kemitraan swasta publik, sektor nirlaba, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintah dan lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada penelitian ini masuk ke dalam paradigma yg keenam, yaitu administrasi publik melibatkan partisipasi warga negara, kelompok warga,

kemitraan swasta publik, sektor nirlaba, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintah dan lainnya.

1.5.2.2 Fungsi Administrasi Publik

Menurut Rasyid (dalam Agustin 2018), administrasi publik memiliki tiga fungsi, yaitu :

- 1) Pelayanan masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat di segala bidang. Pada bidang pelayanan ini pemerintah bertugas menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menyediakan sarana prasarana publik, meningkatkan kesejahteraan sosial, membuat kebijakan ekonomi yang memihak masyarakat serta memelihara SDA dan lingkungan sekitar.
- 2) Pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat.
- 3) Pengembangan, yaitu menciptakan kemakmuran, terutama ekonomi untuk kemakmuran seluruh masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi administrasi publik terbagi menjadi tiga yaitu, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas ketiga fungsi administrasi publik tersebut.

1.5.2.3 Manajemen Publik

Hyde dan Shafritz (dalam Harbani Pasolong, 2008:96), mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih.

Kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Tilano dan Suwitri (2019) mendefinisikan manajemen publik sebagai cara untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga manajemen publik disimpulkan sebagai proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Paradigma Manajemen Publik mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, berawal dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM) yang kemudian menyebabkan perubahan penyebutan *government* menjadi *governance*. Dari pergeseran paradigma inilah muncul istilah tentang *collaborative governance*, yakni berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga selain institusi pemerintah, meliputi kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan (Tilano dan Suwitri, 2019)

Wilson (dalam Harbani Pasolong, 2008:111) menyebutkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik dalam manajemen publik sampai sekarang yaitu : (1) pemerintah sebagai setting utama organisasi; (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi; (4) metode perbandingan sebagai suatu metode

studi pengembangan bidang administrasi publik. Teori ini saya gunakan karena sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu berkaitan dengan proses keterlibatan SDM dalam pengembangan desa wisata.

Manajemen menurut Hasibuan (2011:2) diartikan sebagai ilmu seni yang mempelajari bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Fayol (dalam Badrudin, 2013), fungsi manajemen publik terdiri dari :

- a. Perencanaan (*Planning*), yaitu proses menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu proses mengelompokkan kegiatan yang akan dilakukan dengan menyusun susunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab organisasi. Serta menetapkan kedudukan dan hubungan masing-masing unit yang ada dalam organisasi.
- c. Komando (*Commanding*), fungsi ini berkaitan dengan kegiatan pemberian arahan, saran, bimbingan dan interaksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat terlaksana secara baik dan sesuai tujuan yang ditetapkan.
- d. Koordinasi (*Coordinating*), yaitu kegiatan yang ada di dalam manajemen seperti menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan untuk menghindari kekeliruan, kekacauan, dan kerusakan

sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan organisasi.

- e. Pengawasan (*Controlling*), yaitu fungsi pengendalian dengan memantau dan mengoreksi kegiatan bawahan dalam melakukan tugasnya.

Dari kelima fungsi manajemen tersebut, peneliti akan membahas salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu koordinasi. Koordinasi dalam organisasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan menjalin kerjasama secara efektif dan efisien.

1.5.2.4 Pariwisata

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk usaha pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Menurut pendapat Koen Meyers dan *World Tourism Organization* (WTO) (dalam Nugraha, 2020) pariwisata merupakan aktivitas perjalanan oleh seseorang dari satu ke tempat lain yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dengan tujuan untuk sekedar ingin tahu, menghabiskan waktu, dan liburan.

Asosiasi pariwisata dalam (Nugraha, 2020) mendefinisikan pariwisata sebagai bentuk perjalanan wisata ke alam dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan dan mensejahterakan penduduk yang ada di lingkungan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa pariwisata merupakan kegiatan dengan melakukan perjalanan untuk mengisi waktu luang menuju hal yang berhubungan dengan alam. Berdasarkan letak geografisnya, pariwisata terbagi kedalam tiga jenis, yaitu (Suwena dan Widyatmaja, 2017) :

- 1) Pariwisata Adventure, merupakan kegiatan pariwisata yang dikemas dalam bentuk petualangan. Pariwisata adventure dibagi menjadi tiga skala, yaitu skala kecil terdiri dari menonton pertunjukan burung, diving, skala menengah terdiri dari kegiatan olahraga seperti rafting, yang terakhir skala besar seperti kegiatan petualangan mendaki gunung.
- 2) Pariwisata Alam, merupakan kegiatan pariwisata yang berfokus untuk melakukan studi dan observasi yang berkaitan dengan tumbuhan dan binatang.
- 3) Pariwisata kerakyatan, merupakan kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat mulai dari perencanaan hingga evaluasi dari kegiatan pariwisata tersebut.

1.5.2.5 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek ekonomi, pariwisata berkontribusi terhadap devisa negara dan PDB. Aspek sosial, pariwisata dapat menyerap tenaga kerja, menggali seni, tradisi, dan budaya. Aspek lingkungan, pariwisata dapat menaikkan nilai produk dan jasa seperti adanya keunikan alam, laut, dan alat untuk pelestarian lingkungan alam. (Nugraha, 2020). Oleh

karenanya pengembangan pariwisata harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, akademisi, maupun swasta. Pengembangan pariwisata merupakan proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam untuk dapat dinikmati semua kalangan tanpa merusaknya.

Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, pengembangan pariwisata di Indonesia memiliki tujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
- 2) Mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kepuasan wisatawan serta memperluas pasar.
- 4) Menciptakan pariwisata Indonesia yang kondusif dengan berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas KKN.

Menurut Cooper yang dikutip oleh Suwena dan Widyatmaja, pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki daerah. Peningkatan tersebut tentunya harus didukung oleh komponen-komponen yang mendukung pengembangan wisata. Komponen-komponen tersebut antara lain (Suwena dan Widyatmaja, 2017) :) :

- 1) Objek daya tarik wisata (*Attraction*), berupa keunikan alam dan budaya.
- 2) Aksesibilitas (*Accessibility*), merupakan kemudahan sarana seperti akses transportasi menuju tempat wisata.

- 3) Fasilitas (*Amenities*), berupa fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang wisata seperti penginapan, tempat makan, dan akses transportasi.
- 4) Pelayanan tambahan (*Ancillary Service*) yang melengkapi tempat wisata. Seperti tour guide dan buku wisata.

Selain itu, dalam pengembangan pariwisata terdapat faktor-faktor pendukung yang berpengaruh. Menurut Clare A. Gunn yang dikutip oleh Nugraha, faktor-faktor tersebut meliputi :

- 1) Sumber Daya Alam, merupakan kondisi alam sekitar tempat wisata seperti potensi alam, kondisi topografi, dll.
- 2) Warisan budaya, setiap daerah tempat wisata hampir semuanya memiliki warisan budaya untuk dilestarikan, misalnya bangunan bersejarah, wisata religi, kerajinan, industri, dan tempat hiburan.
- 3) Biaya atau keuangan, dukungan finansial dari stakeholder memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata.
- 4) Pihak Swasta, pihak swasta memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata, misalnya sebagai penyumbang ide kreatif, perluasan relasi, dan sebagai investor.
- 5) Kebijakan pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah menjadi payung hukum yang mengawal pengembangan pariwisata.
- 6) Tenaga kerja, tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Kapasitas SDM yang kompeten dan

memiliki skill khusus menjadi nilai penting untuk menunjang pariwisata.

- 7) Masyarakat, pengembangan pariwisata secara langsung berdampak pada kepada masyarakat tempat wisata. Dengan adanya pengembangan pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak positif dengan meminimalisir dampak negatif.
- 8) Organisasi, sebagai penentu arah pengembangan pariwisata dengan menjadi wadah untuk menyamakan tujuan, (Nugraha, 2020).

1.5.2.6 Desa Wisata

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (dalam Fikri, 2020), desa wisata merupakan kawasan yang menyajikan suasana asli pedesaan jika dilihat dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya. Desa Wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relative masih asli.

Priasukmana dan Mulyadin (dalam Fikri, 2020), menetapkan kunci sukses dalam pembangunan Desa Wisata, antara lain :

- 1) Pembangunan SDM melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, diskusi dan sebagainya. Adanya kegiatan

tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan profesional dalam mengelola potensi wisata.

- 2) Kemitraan, merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pengelola dan mitra pariwisata. Misalnya promosi dan pelatihan.
- 3) Kegiatan pemerintahan di desa, kegiatan ini meliputi musyawarah, rapat dengan dinas terkait, penyelenggaraan pameran pembangunan di desa wisata.
- 4) Promosi, kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai media dengan menjalin kerjasama kepada wartawan dari media cetak maupun elektronik.
- 5) Festival, merupakan penyelenggaraan kegiatan yang menarik dan unik untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut.
- 6) Membina organisasi warga, pembentukan organisasi sangat diperlukan untuk menjadi wadah dalam menyamakan tujuan adanya desa wisata.
- 7) Kerjasama dengan universitas, kerjasama ini memberikan peluang terhadap desa wisata untuk memperoleh masukan dan saran untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

Menurut Kementerian Pariwisata dalam Buku Pedoman Desa wisata terdapat beberapa jenis-jenis desa wisata yang dapat menjadi pedoman antara lain:

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama seperti sekarang Lembah pantai sungai danau dan berbagai bentuk tentang alam yang unik lainnya
- b. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yakni desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan budaya kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian religi maupun bentuk aktivitas lainnya.
- c. Desa wisata kreatif Yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari setiap kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal baik berupa kerajinan maupun aktivitas kesenian yang menjadi daya tarik utama.
- d. Desa wisata berbasis kombinasi yakni desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih banyak daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam Budaya dan kreatif

Keberadaan desa wisata merupakan bentuk penyatuan pariwisata antara potensi alam, akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung wisata. Selain itu, juga didukung dengan struktur kehidupan masyarakat yang masih menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Dalam penelitian ini Desa Wisata Jungsemi yang menjadi *locus* penelitian termasuk dalam jenis desa wisata berbasis kombinasi karena memiliki lebih dari satu daya tarik wisata yang dimiliki.

1.5.2.7 Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash *collaborative governance* atau pemerintahan kolaboratif merupakan strategi baru yang dimiliki oleh pemerintah. Strategi baru tersebut merupakan bentuk pemerintah yang melibatkan berbagai *stakeholders* secara bersama-sama dengan satu tujuan yang sama untuk membuat keputusan (Ansell dan Alison dalam Hariadi, 2019). Pengambilan keputusan tersebut didasarkan atas keputusan kelompok atau organisasi, bukan individu. Dalam konteks administrasi publik, kolaborasi merupakan bentuk pelaksanaan *governance* untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan dengan mendahulukan kesepakatan dari beberapa *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat (Ladiana, 2019). Lemos & Agrawal (dalam Cahya, 2020) mendefinisikan *collaborative governance* tidak terbatas pada pemerintahan saja, tetapi juga berhubungan dengan keterlibatan multipartener *governance* seperti sektor privat, sektor swasta, hingga masyarakat sipil yang memiliki kepentingan bersama seperti menjalin kerjasama antar public-privat-sosial. Purnomo, dkk (2018) mengartikan *collaborative governance* sebagai konsep manajemen pemerintahan yang memiliki peran untuk memfasilitasi dan melaksanakan penyelesaian masalah secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, maupun NGOs. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan kerja sama yang tidak hanya melibatkan pemerintahan saja tetapi juga swasta dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan

bersama. Ansell dan Gash merinci beberapa alasan-alasan pentingnya

Collaborative Governance, antara lain :

- 1) Adanya kompleksitas dan ketergantungan antar institusi
- 2) Adanya konflik kepentingan antar kelompok yang sulit diredam
- 3) Sebagai upaya mencari cara untuk mencapai legitimasi politik
- 4) Kegagalan implementasi kebijakan di lapangan
- 5) Ketidakmampuan kelompok, karena adanya pemisahan kekuasaan untuk menghambat keputusan
- 6) Mobilisasi kelompok kepentingan
- 7) Tingginya biaya dan politisasi peraturan.

Selain itu, Ansell dan Gash (dalam Ladiana, 2019) juga mengemukakan enam kriteria yang harus ada dalam *collaborative governance*, yaitu :

- 1) Kegiatan ini dimulai oleh pemerintah atau lembaga-lembaga public
- 2) Anggota dalam kegiatan ini mencakup aktor non pemerintah
- 3) Anggota harus memiliki keterlibatan untuk mengambil keputusan
- 4) Kegiatan bersifat resmi dan terorganisir
- 5) Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mencapai keputusan bersama
- 6) Berfokus pada kerangka kebijakan public atau manajemen public.

Proses Collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (dalam Cahya, 2020), yaitu :

- a. Dialog tatap muka

Dialog secara langsung antar *stakeholders* bertujuan untuk mengidentifikasi peluang untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menjalin komunikasi, membangun kepercayaan dan komitmen. Dialog tatap muka ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahpahaman antar *stakeholders* yang terlibat. Sehingga diharapkan adanya proses dialog seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi dalabat berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dialog biasanya dilakukan melalui kegiatan musyawarah dengan kehadiran seluruh stakeholder yang terlibat.

b. Kepercayaan

Membangun kepercayaan antar *stakeholders* diperlukan untuk menyadari pentingnya kolaborasi dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepercayaan sangat diperlukan dalam proses kolaborasi untuk menghilangkan keterbatasan pengetahuan dan perbedaan antar *stakeholders*. Keberhasilan dalam membangun kepercayaan juga akan mendorong partisipasi dari masing-masing stakeholder untuk terlibat dalam proses kolaborasi.

c. Komitmen

Komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari *stakeholders* untuk keberlanjutan pengembangan kolaborasi. Komitmen juga bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan apresiasi bersama terhadap proses. Komitmen terhadap proses berkaitan erat dengan ketergantungan antar *stakeholders* yang tinggi. Komitmen ini memiliki

pengaruh terhadap sikap dari para *stakeholders* untuk dapat mencapai tujuan. Komitmen biasanya dibangun berlandaskan visi misi yang sama di awal proses kolaborasi.

d. Pemahaman bersama

Pemahaman bersama dimaksudkan untuk menyatukan tujuan dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama untuk mencegah kesalahpahaman. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan adanya misi bersama, tujuan bersama, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Pemahaman yang kurang dalam visi dan misi dapat memunculkan permasalahan dikemudian hari, selain itu disebabkan juga karena cara dalam mencapai tujuan bersama tersebut berbeda antar *stakeholders*.

e. Dampak sementara

Dampak sementara merupakan outcomes dari proses kolaborasi. Dampak sementara ini dapat dijadikan alternatif untuk mengembangkan keberhasilan kolaborasi. Dampak sementara ini dapat dilihat dari target yang telah ditentukan apakah tercapai atau tidak. Hasil sementara dalam proses kolaborasi ini dapat membantu dalam mencari evaluasi agar dapat memperbaiki proses kolaborasi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Dalam proses pengembangan Desa Wisata Jungsemi, pada dasarnya menghadapi tantangan berupa perbedaan karakteristik, pola pikir, dan pemahaman antar aktor. Oleh karenanya peneliti

menggunakan teori ini untuk melihat bagaimana jalannya koordinasi dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* pengembangan Desa Wisata Jungsemi.

1.5.2.8 Stakeholders

Stake diartikan sebagai kepentingan, sedangkan holder sebagai pemegang, dengan begitu *stakeholders* dapat diartikan sebagai pemegang kepentingan. Menurut Freedman (dalam Nuwita dkk2 2021) *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Nuwita (2021) mendefinisikan *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun di pengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung.

Analisis *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan menurut Thompson (2011) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Subyek (*Subjects*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut Lain (*Crowd*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Contest setters*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Maryono (dalam Handayani, 2017) membagi *stakeholders* ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. *Stakeholders* primer

Stakeholders primer merupakan stakeholder yang terlibat secara langsung dan memiliki peran kuat terkait pengembangan kegiatan. *Stakeholders* ini harus terlibat secara penuh terhadap setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Oleh karenanya *stakeholders* primer merupakan stakeholder yang secara langsung terkena dampak positif maupun negative terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

2. *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam setiap pengambilan keputusan. *Stakeholders* ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

3. *Stakeholders* sekunder

Stakeholders sekunder atau stakeholder pendukung tidak memiliki kewenangan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Tetapi *stakeholders* ini ikut serta melibatkan dirinya secara sukarela terhadap setiap proses berlangsungnya kegiatan. *Stakeholders* ini dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep dari Maryono untuk mengidentifikasi aktor yang ikut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi antara lain *stakeholders* primer, *stakeholder key* (kunci), dan *stakeholders* sekunder (pendukung).

1.5.2.9 Koordinasi

Menurut Mooney dan Reily (dalam Handayaniingrat, 1990), koordinasi merupakan kegiatan menyatukan beberapa kegiatan dan tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. G.R Terry (dalam Hasibuan, 2007) mengidentifikasi koordinasi sebagai usaha yang dilakukan setiap unit organisasi untuk menyelaraskan tindakan atau kegiatan yang dilakukan agar tercipta keseimbangan pada organisasi. Sehingga koordinasi dapat disimpulkan sebagai proses yang dilakukan oleh setiap bagian dalam organisasi untuk menciptakan keseragaman dalam mencapai tujuan bersama.

Ciri-ciri koordinasi sebagaimana dijelaskan Mc Farland (dalam Handayaniingrat, 1990), yaitu :

- a. Adanya tanggung jawab pada seorang pemimpin dalam organisasi.
- b. Adanya proses yang saling berkaitan dalam melaksanakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Adanya aturan yang ditaati bersama dan ditetapkan sebagai pedoman dalam menjalankan koordinasi.
- d. Kesatuan tindakan antara satu dengan yang lainnya agar tercipta keseragaman untuk mencapai tujuan.
- e. Adanya tujuan koordinasi yang ditujukan untuk semua anggota yang terlibat dalam kegiatan agar tercapai tujuan organisasi.

Bentuk koordinasi menurut Usman (2008) yaitu terdapat koordinasi hierarkis (vertical) dan koordinasi fungsional (horizontal). *Pertama*, koordinasi hierarkis merupakan koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada unit atau bagian yang ada dibawahnya. Bentuk koordinasi seperti ini memudahkan pemimpin untuk memberi sanksi kepada pihak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kedua, koordinasi fungsional merupakan koordinasi yang dilakukan pemimpin terhadap unit atau bagian yang setingkat dan memiliki tugas yang saling berkaitan. Bentuk koordinasi ini terbagi menjadi dalam dua bagian, yaitu :

1. *Interdisciplinary* adalah koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan berbagai tindakan yang dilakukan antar unit dengan tugas yang sama.
2. *Interrelated* adalah koordinasi yang dilakukan antar unit yang berbeda tetapi memiliki ketergantungan dan ikatan atau level yang setara. Koordinasi ini sulit dilakukan oleh pimpinan karena tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada unit yang levelnya sama.

Sedangkan indikator untuk menganalisis koordinasi menurut Ndraha (2015), yaitu :

- a) Informasi, komunikasi, dan teknologi. Informasi merupakan rangkuman data dalam pengambilan keputusan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan teknologi merupakan sistem

yang berbasis pada penggunaan computer untuk membantu jalannya koordinasi.

- b) Kesadaran terhadap pentingnya koordinasi dari setiap pihak yang terlibat, hal ini dapat dilihat dari jalannya komunikasi antar pihak.
- c) Kompetensi *stakeholders*, dilihat dari adanya keterlibatan aktor atau pejabat berwenang sesuai dengan bidang pembangunan yang berlangsung.
- d) Kesepakatan dan komitmen, kesepakatan merupakan kunci koordinasi agar tetap berjalan searah untuk mencapai tujuan.
- e) Penetapan kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi.
- f) Insentif koordinasi, yaitu adanya sanksi kepada pihak yang melanggar kesepakatan bersama.
- g) Feedback merupakan umpan balik yang muncul dalam proses koordinasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori koordinasi menurut Ndraha untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang terjadi antar *stakeholders*. Serta menganalisis proses keberhasilan koordinasi yang diciptakan oleh *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Indikator koordinasi tersebut meliputi informasi, komunikasi, dan teknologi, kesadaran terhadap pentingnya koordinasi, kompetensi masing-masing *stakeholders*, kesepakatan dan komitmen,

penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, dan feedback dari proses jalannya koordinasi.

1.5.2.10 Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi

Dalam proses koordinasi terdapat dua factor yang mempengaruhi yaitu factor yang menjadi pendukung keberhasilan koordinasi dan factor yang menjadi penghambat jalannya koordinasi. Menurut Hasibuan (2007), factor yang menjadi mempengaruhi koordinasi tersebut yaitu :

1. Kesatuan tindakan dari setiap *stakeholders* yang terlibat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, pemimpin bertugas mengkoordinasikan setiap bawahan untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya. Pemimpin yang mampu mengarahkan bawahan sesuai dengan tujuan menjadi kunci keberhasilan koordinasi.
2. Komunikasi dalam koordinasi merupakan aspek penting baik bagi pimpinan atau bawahan. Tujuan adanya komunikasi adalah untuk menyampaikan hal-hal penting seperti tugas, rancangan strategi dan yang lainnya. Komunikasi yang berjalan dengan baik dapat dilihat ketika adanya respon antara komunikator dan komunikan.
3. Pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama. Pembagian kerja dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya pembagian kerja yang seimbang akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

4. Kedisiplinan setiap anggota dalam menjalankan tugasnya. Penegakan kedisiplinan kepada setiap unit bertujuan untuk menghindari hal-hal di luar kesepakatan bersama.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Koordinasi dalam Kolaborasi Antar *Stakeholders* Pengembangan Desa

Wisata Jungsemi

Pengembangan desa wisata berkaitan dengan kolaborasi antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam proses koordinasi. Koordinasi yang belum maksimal memerlukan peningkatan dengan menyatukan integritas dan kerjasama antar *stakeholders*. Koordinasi dalam kolaborasi antar *stakeholders* pengembangan Desa Wisata Jungsemi tersebut dapat dilihat melalui indikator-indikator menurut Ndraha, meliputi :

- a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Informasi merupakan dasar pencapaian koordinasi. Adanya informasi yang jelas merupakan langkah awal untuk memulai proses koordinasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antar *stakeholders*. Adanya komunikasi dua arah menciptakan timbal balik atau respon untuk mendukung keberhasilan koordinasi. Sedangkan teknologi informasi merupakan sarana penghubung antara informasi dan komunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, penyampaian informasi saat ini memiliki media yang sangat beragam untuk menunjang kelancaran koordinasi.

- b. Kesadaran pentingnya koordinasi. Pada dasarnya *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi harus mempunyai rasa saling membutuhkan. Hal tersebut menjadi titik dimana setiap *stakeholders* harus saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Setelah mengetahui adanya penyampaian informasi melalui komunikasi berkaitan dengan koordinasi, *Stakeholders* diharapkan memiliki kesadaran dalam berkoordinasi yang dapat dilihat dari perumusan startegi yang sama dalam meningkatkan pengembangan desa wisata.
- c. Kompetensi *stakeholders*. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* menjadi penentu arah pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Keberadaan *stakeholders* yang sesuai dengan bidang pengembangan pariwisata akan memudahkan dalam menjalin koordinasi.
- d. Kesepakatan dan komitem dalam menjalankan koordinasi. Keterlibatan *stakeholders* dari awal hingga akhir akan mempengaruhi proses keberhasilan koordinasi. Konsistensi dari masing-masing *stakeholders* sangat diperlukan untuk menjaga komiten dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi.
- e. Penetapan kesepakatan terhadap semua *stakeholders*. Adanya penetapan kesepakatan dapat dilihat dari kesatuan pemikiran, presepsi, dan tujuan untuk memajukan desa wisata. Keselarasan dan sinkronisasi antar *stakeholders* diperlukan untuk memudahkan koordinasi.

- f. Insentif koordinasi. Insentif koordinasi merupakan sanksi bagi *stakeholders* yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi sosial yaitu dikeluarkannya *stakeholders* tersebut dalam proses pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Adanya sanksi diperlukan memperkuat koordinasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selain itu juga untuk menjaga komitmen dan kesepakatan yang telah dibuat di awal terjadinya koordinasi.
- g. Feedback atau umpan balik. Feedback dalam koordinasi diperlukan sebagai bahan masukan untuk melanjutkan ke tahap proses koordinasi selanjutnya.

1.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi dalam Kolaborasi Antar *Stakeholders* Pengembangan Desa Wisata Jungsemi

Proses menciptakan koordinasi yang baik akan selalu didukung oleh factor-faktor tertentu dan juga dihadapkan dengan hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi dalam kolaborasi antar *stakeholders* pengembangan Desa Wisata Jungsemi meliputi :

1. Kesatuan tindakan dari setiap *stakeholders*.

Adanya kesatuan tindakan dapat dilihat dari peran pemimpin dalam menjalin koordinasi.

2. Komunikasi

Komunikasi yang baik antar *stakeholders* dalam menjalankan koordinasi menjadi aspek pendukung untuk saling bertukar informasi terkait pengembangan desa wisata.

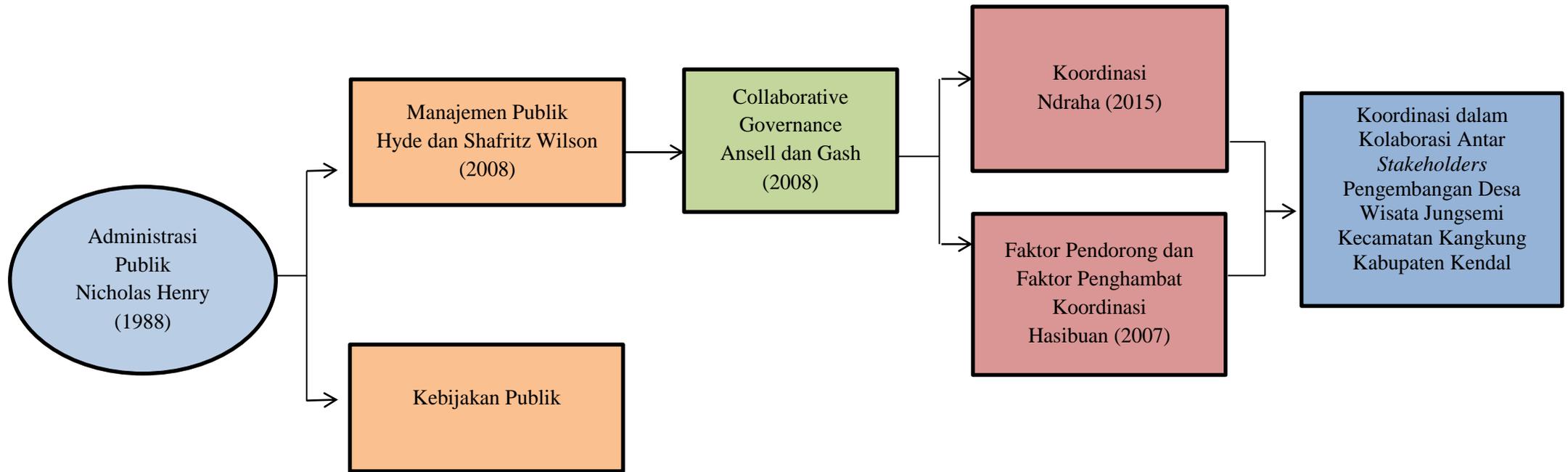
3. Pembagian kerja

Pembagian Kerja yang sesuai dengan kemampuan *stakeholders* akan memudahkan proses pengembangan desa wisata. Pembagian kerja juga dapat dilihat dengan adanya struktur pengurus desa wisata.

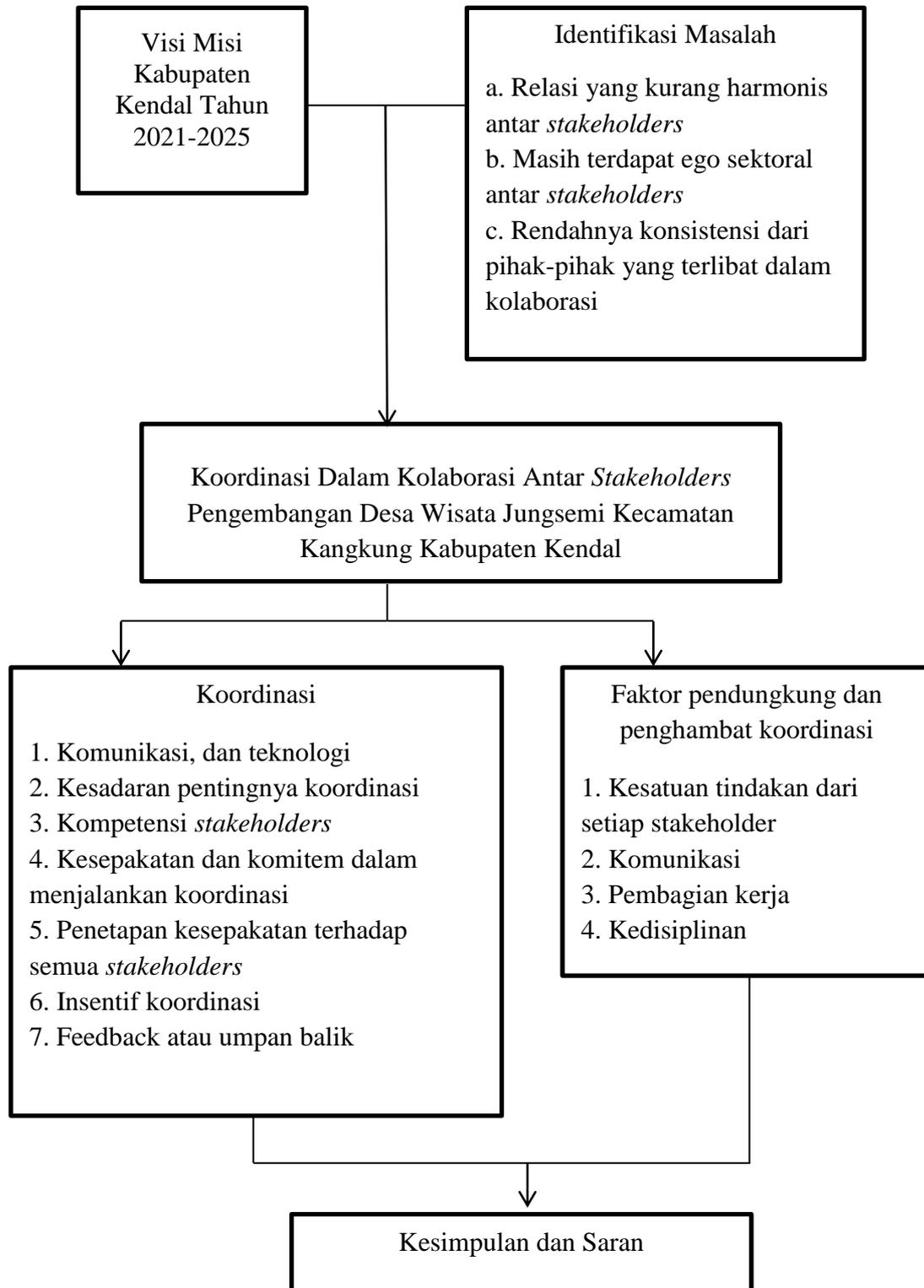
4. Kedisiplinan

Sikap disiplin setiap *stakeholders* akan terlihat ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses koordinasi pengembangan Desa Wisata. Kedisiplinan menjadi kunci untuk mencapai tujuan koordinasi secara efektif dan efisien.

Gambar 1. 2 Kerangka Teori



Gambar 1. 3 Kerangka Pikir Penelitian



Tabel 1. 5 Fenomena dan Indikasi Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Indikasi	Informan
Koordinasi	Komunikasi, dan teknologi	Komunikasi: Unsur komunikasi dalam terjadinya koordinasi Teknologi: Penggunaan teknologi dalam proses komunikasi dalam koordinasi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	Kesadaran pentingnya koordinasi	1. Makna koordinasi bagi setiap stakeholder 2. kesamaan perumusan startegi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	Kompetensi <i>stakeholders</i>	1. Alasan bergabung dalam pengembangan desa wisata 2. Kemampuan yang dimiliki setiap stakeholder dalam berkontribusi menjalankan koordinasi pengembangan Desa Wisata	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	Kesepakatan dan komitmen	1. Proses keterlibatan <i>stakeholder</i> 2. Rangkaian kesepakatan (jenis, pencipta)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

		3. Penetapan komitmen (bentuk dan proses terciptanya komitmen)	
	Penetapan kesepakatan	Kesatuan pemikiran, persepsi, dan tujuan	1
	Insentif koordinasi	1. keberadaan sanksi 2. Bentuk sanksi 3. Pertimbangan pemberian sanksi	1
	Feedback	Sikap dan bentuk penerimaan terhadap masukan dan saran	1
Faktor pendukung dan penghambat koordinasi	Kesatuan tindakan	1. Kejelasan pengarahan dari pemimpin 2. Bentuk pengerahan 3. Isi pengarahan	3, 4, 5, 6, 7
	Komunikasi	1. Kesiambungan komunikasi 2. Proses pertukaran informasi	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
	Pembagian Kerja	Keterkaitan <i>jobdesk</i> dengan latar belakang <i>stakeholders</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	Kedisiplinan Anggota	1. Keberadaan peraturan 2. Bentuk peraturan	1

Keterangan Informan

- Informan 1 : Pemerintah Desa Jungsemi
- Informan 2 : Tim Pengabdian UPGRIS
- Informan 3 : Masyarakat Desa Jungsemi
- Informan 4 : Ketua Pokdarwis
- Informan 5 : Ketua Karang Taruna
- Informan 6 : Pegawai DISPORA Kab. Kendal
- Informan 7 : Ketua BUMDES
- Informan 8 : Radar Semarang

1.7 Argumen Penelitian

Pembangunan koordinasi antar *stakeholders* diperlukan untuk mengelola potensi wisata dengan mengintegrasikan kemampuan stakeholder untuk dapat berkolaborasi. Dalam penelitian ini, kurangnya koordinasi dalam kolaborasi antar *stakeholders* pengembangan Desa Wisata Jungsemi masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan relasi yang kurang harmonis antara POKDARWIS, Swasta, dan pemerintah desa, masih terdapat ego sektoral antar stakeholder, rendahnya konsistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana meningkatkan koordinasi antar *stakeholders* pengembangan Desa Wisata Jungsemi dengan melihat indikator koordinasi. Indikator tersebut meliputi Informasi, komunikasi, dan teknologi, adanya kesadaran terkait pentingnya koordinasi, kompetensi *stakeholders*, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, dan feedback

Masing-masing *stakeholders* memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dilaksanakannya koordinasi. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi meliputi UPGRIS, Masyarakat Desa Jungsemi, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, BUMDES Sidodadi, POKDARWIS, Pemerintah Desa Jungsemi, serta media dari Radar Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung koordinasi antar *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Faktor pendukung dapat dilihat dari

sisi dengan melihat factor-faktor yang terdiri dari Kesatuan tindakan, komunikasi, adanya kejelasan pembagian kerja, dan kedisiplinan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menelusuri sesuatu secara cermat, dan kritis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan fakta-fakta dan data guna menetapkan suatu keilmuan (Subadi, 2006). Penelitian dalam ilmu pengetahuan menempatkan posisi untuk mengembangkan dan melindungi dari kepunahan, dalam artian untuk memperbarui, meng-upgrade, dan aksiologis bagi masyarakat (Bungin dalam Nugrahani, 2014). Subadi (2006) mengatakan bahwa ditinjau dari jenis data, penelitian dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan secara alamiah, apa adanya, dan jelas tentang bagaimana koordinasi yang terjadi antar *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Hal tersebut sebagaimana pendapat dari Nugrahani (2014) bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi penelitian dalam konteks yang alami sesuai dengan apa yang sebenarnya di lapangan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan data berupa gambar dan kata-kata untuk menggambarkan keadaan secara objektif. Metode penelitian deskriptif merupakan upaya pencarian fakta

untuk menginterpretasikan data secara tepat (Moelong, 2010). Penelitian ini bersifat mengungkap data-data serta menganalisis situasi dan hubungan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tentang data yang diperoleh di masyarakat.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk memperoleh data-data penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Desa Jungsemi menjadi salah satu Desa Wisata di Kabupaten Kendal yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif memerlukan informan guna memperoleh dan mengumpulkan data-data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling* untuk dapat dijadikan subjek penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang telah direncanakan dan ditentukan sebelum melakukan penelitian. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel bola salju atau rujukan berantai, dimana informan yang terpilih dapat menjadi rujukan peneliti untuk memperoleh informan lain yang berpotensi mengetahui dan memiliki pengetahuan terhadap permasalahan penelitian tanpa direncanakan untuk wawancara (Mack, 2005). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah UPGRIS, Masyarakat Desa Jungsemi, Dinas Pemuda, Olahraga, dan

Pariwisata Kabupaten Kendal, BUMDES Sidodadi, POKDARWIS, Pemerintah Desa Jungsemi, serta media dari Radar Semarang.

1.8.4 Jenis Data

Lofland dalam Moleong (2010) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata seperti wawancara, sumber tertulis, foto, dan data statistic, selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen lain. Untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data yakni sumber data primer, dan data sekunder. Jenis data yang akan digunakan peneliti adalah :

1. Kata-kata tertulis dan tindakan

Kata-kata tertulis diperoleh langsung dari informan melalui wawancara sebagai sumber keterangan guna data yang diperoleh agar lebih valid. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan adalah hasil dari gabungan kegiatan yang dilihat, didengar, dan dijawab. Peneliti juga harus dapat mewawancarai orang-orang yang sudah dijadikan informan guna mendapatkan informasi mengenai keadaan pariwisata di desa tersebut. Pada kegiatan wawancara, peneliti akan bertanya dan mendengarkan berbagai informasi dari informan sehingga dapat dijadikan data untuk penelitian.

2. Sumber Tertulis

Sumber data menurut Moelong (2010) berasal dari sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Pada penelitian ini, sumber

tertulis ada pada beberapa buku, internet, dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Jungsemi.

3. Foto

Moelong (2010) mendefinisikan foto sebagai jenis data dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif yang hasilnya dianalisis secara induktif. Melalui foto, peneliti dapat mengetahui kondisi Desa Wisata Jungsemi secara lebih jelas.

4. Data Statistik

Penelitian kualitatif menggunakan data statistik yang mampu digunakan sebagai sumber data tambahan. Data statistik dapat memberikan gambaran kecenderungan subjek pada latar penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data statistik sebagai data pendukung dalam melakukan analisis yang didapatkan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Jungsemi.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan hal penting dalam penelitian, ketepatan dalam pemilihan sumber data akan mempengaruhi ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh (Nugrahani, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui informan. Yang termasuk dalam data primer adalah transkrip hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara untuk mewawancarai UPGRIS, Masyarakat Desa Jungsemi, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, BUMDES Sidodadi, POKDARWIS, Pemerintah Desa Jungsemi, serta media dari Radar Semarang. Sedangkan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati lokasi desa, keadaan desa, potensi desa, lingkungan fisik desa, dan interaksi dengan masyarakat sekitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar lokasi penelitian sebagai penunjang data primer dalam bentuk dokumentasi. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan sumber lain. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari buku profil Desa Jungsemi, laporan tahunan Desa Jungsemi, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data terkait penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian kualitatif umumnya pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Subadi, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang menjadi sumber data untuk memperoleh jawaban secara lisan (Barlian, 2016). Subadi (2006) mengungkapkan, dalam penelitian kualitatif, terdapat dua alasan yang mendasari metode pengumpulan data wawancara mendalam sebagai metode utama, yaitu, 1) peneliti dapat memperoleh data secara mendalam dan yang tersembunyi dalam diri subjek penelitian; 2) peneliti dapat memperoleh data dari informan yang mencakup hal-hal yang bersifat lintas-waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Wawancara mendalam dipilih oleh peneliti untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi atau data tentang koordinasi yang terjadi antar stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Dalam metode ini, peneliti akan mewawancarai informan yang dianggap relevan, yang dapat menjadi sumber data dalam masalah ini. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada narasumber atau menggunakan pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada permasalahan penelitian.

Sehingga diharapkan wawancara yang dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam. Peneliti juga akan menggunakan alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat rekaman ini nantinya akan membantu apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.

2. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, serta gejala alam (Barlian, 2016). Observasi menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif karena melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan secara langsung untuk dapat menganalisis dan melakukan pencatatan terhadap tingkah laku individu atau kelompok sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. (Nugrahani, 2014). Nugrahani (2014) juga membagi jenis observasi menjadi empat, yaitu a) observasi berperan serta secara lengkap. Observer menjadi anggota dalam kelompok untuk memperoleh informasi termasuk yang bersifat rahasia; b) observasi pemeran serta sebagai pengamat. Observer tidak terlibat sepenuhnya dan membatasi subjek; c) observasi pengamat sebagai pemeran serta. Posisi observer diketahui oleh umum, sehingga informasi mudah diperoleh; d) observasi pengamat penuh. Observer memiliki kebebasan pengamatan terhadap subjek dan tidak diketahui posisinya. Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah

observasi pengamat sebagai pameran serta karena peneliti hanya datang mengamati kegiatan di Desa Wisata Jungsemi tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun, keberadaan peneliti diketahui oleh umum. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai koordinasi yang terjadi antar *stakeholders*, serta faktor pendukung dan penghambat koordinasi pengembangan Desa Wisata Jungsemi.

3. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Subadi (2006) berpendapat bahwa dokumentasi umumnya berkaitan dengan situasi sosial tertentu, situasi sosial tersebut terdiri dari tiga elemen, yaitu: 1) lokasi/fisik berlangsungnya peristiwa; b) aktor yang menduduki posisi dan memainkan peran tertentu; c) aktivitas aktor pada lokasi berlangsungnya peristiwa. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, laporan tahunan dan catatan harian lainnya yang dimiliki pemerintah Desa Jungsemi ataupun Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengorganisasikan data, memilah data menjadi agar dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan hal

penting membuat keputusan (Nugrahani, 2014). Menurut Moelong (2002), analisis data dalam penelitian didasarkan pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data yaitu, informan dari hasil wawancara, hasil pengamatan lapangan, dan hasil analisis dari dokumentasi. Analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Nugrahani, 2014), mengemukakan tiga model dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan informasi yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Dalam prosesnya, peneliti juga dapat melakukan *coding* dengan cara memusatkan tema, menentukan batas permasalahan, dan membuat catatan ringkas mengenai informasi hasil penelitian. Proses ini berlangsung selama penelitian untuk menemukan data yang valid. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai koordinasi yang terjadi antar stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data berupa kalimat yang telah disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami untuk memudahkan peneliti. Penyajian data mengacu rumusan masalah, sehingga narasi

yang tersaji merupakan jawaban berupa deskripsi mengenai kondisi atas jawaban permasalahan yang ada. Penyajian data ini dapat dilengkapi dengan matriks, gambar, table, ilustrasi, dan sebagainya. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu koordinasi dalam kolaborasi antar stakeloder, serta faktor pendukung dan penghambat koordinasi pengembangan Desa Wisata.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menafsirkan hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memantapkan dan menelusuri data agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan penggunaan software Nvivo. Software Nvivo memiliki keunggulan dalam membantu penelitian karena dapat membaca berbagai macam jenis data khususnya pada penelitian kualitatif. Nvivo dapat membantu peneliti mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Software ini dapat membuat gambaran jaringan yang mampu menelusuri hubungan dari hasil penelitian untuk dianalisis. Nvivo juga dapat memperkuat keyakinan peneliti untuk menguji kevalidan data.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif merupakan hal penting untuk meningkatkan derajat kepercayaan penelitian (Barlian, 2016).

Menurut Subadi (2006), kesalahan pada data penelitian juga akan mempengaruhi hasil penelitian. Untuk mengetahui kualitas data, terdapat empat teknik, yaitu: 1) kredibilitas (*credibility*), (2) transferabilitas (*transferability*), (3) dependabilitas (*dependability*), (4) konfirmabilitas (*confirmability*) (Lincoln, dan Guba dalam Subadi, 2006). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji kualitas data. Menurut Barlian (2016), uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, a) perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan objek penelitian; b) ketekunan dalam pengambilan data dan; c) melakukan triangulasi. Teknik uji kredibilitas pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, waktu, dan cara (Barlian, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber data untuk mengetahui kualitas data.

Triangulasi sumber data merupakan pengumpulan data dari sumber yang berbeda untuk menguji kebenarannya. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui apakah data yang didapat sudah valid. Pada triangulasi sumber data dilakukan dengan cara: a) Peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; b) Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi antara lain, UPGRIS, Masyarakat Desa Jungsemi, Dinas Pemuda, Olahraga, dan

Pariwisata Kabupaten Kendal, BUMDES Sidodadi, POKDARWIS, Pemerintah Desa Jungsemi, serta media dari Radar Semarang. Data dari sumber tersebut akan dianalisis oleh peneliti sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sama.